



KR-Sukro Riyadi

**KAWASAN PENYANGGA:** Perahu nelayan bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Songbanyu, Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, DIY, Rabu (2/2). Nelayan tengah berburu ikan jenis layur dan lainnya di pelabuhan yang menjadi salah satu kawasan penyangga kebutuhan ikan laut di DIY dan sekitarnya tersebut.

## KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS GANDENG KPK

# Awasi Lebih Tajam Pembangunan IKN

**JAKARTA (KR)** - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan lebih tajam dalam perencanaan dan pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Terkait hal itu, Ketua KPK Firlil Bahuri menyatakan, dalam pengawasan perencanaan dan pembangunan IKN, KPK akan melakukan sejumlah hal. Pertama, sinergi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait IKN, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

"Kedua, koordinasi penyiapan lahan maupun pembangunan infrastruktur terkait tata kelola pemerintahan," kara Firlil saat jumpa pers bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang datang ke KPK untuk berkoordinasi dalam perencanaan dan pembangunan IKN, Rabu (2/2) di Jakarta. Yang ketiga dilakukan KPK,

menurutnya, pendampingan persiapan dan perencanaan khususnya untuk program pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi.

"Kami juga membuka aplikasi Jaga IKN agar masyarakat turut serta dalam pencegahan korupsi di IKN," jelas Firlil yang sebelumnya menyanggapi lembaganya untuk pindah ke IKN di Kalimantan Timur.

Dikatakan, pihaknya tidak pernah berkeberatan pindah. Menurut Firlil, yang mendasari yaitu perannya sebagai aparat sipil negara (ASN). ASN sebagai pelaksana kebijakan, ASN sebagai pemberi pelayanan publik, ASN perekat kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

"Jadi, di mana pun KPK ber-

ada, tiga hal tersebut harus dimainkan dan UU 19/2019 menyebutkan KPK berkedudukan di Ibukota Negara, ini yang harus dilaksanakan," tegas Firlil.

Suharso Monoarfa mengajak KPK untuk melakukan pengawasan lebih tajam dalam perencanaan dan pembangunan IKN di Kaltim. Pasalnya, KPK sudah masuk ke dalam kelompok kerja (Pokja) yang ikut mengawasi.

"Akan tetapi, kami ingin lebih tajam lagi dalam hal persiapan, perencanaan, dan pembangunan," kata Suharso seraya menyebutkan, pertama agar tidak terjadi inefisiensi dalam harga-harga lahan dan inefisiensi harga lain sehingga terjadi kenaikan yang memberatkan semua pihak dalam pembangunan IKN.

(FuI)-f

## WAKSIN SINOPHARM

### Diizinkan Sebagai Dosis Booster

**JAKARTA (KR)** - Vaksin Sinopharm menjadi vaksin Covid-19 keenam yang digunakan sebagai dosis booster atau dosis lanjutan. Izin dikeluarkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Penny K Lukito di Jakarta, Rabu (2/2) menuturkan, BPOM menerbitkan Izin Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization/EUA) untuk vaksin Sinopharm menjadi vaksin Covid-19 keenam yang digunakan sebagai dosis booster atau dosis lanjutan.

Vaksin dengan nama SARS-Cov-2 Vaccine (Vero Cell) Inactivated, produksi Beijing Bio-Institute Biological, Tiongkok atau dikenal sebagai vaksin Sinopharm ini telah didaftarkan PT Kimia Farma untuk penggunaan booster homolog pada usia dewasa 18 tahun atau lebih yang telah mendapatkan dosis primer lengkap sekurang-kurangnya 6 bulan.

"Sesuai persyaratan penggunaan darurat, BPOM telah melakukan evaluasi terhadap aspek khasiat dan keamanan mengacu pada standar evaluasi vaksin Covid-19 untuk vaksin Sinopharm sebagai dosis booster homolog untuk dewasa 18 tahun ke atas," ujarnya.

Penny mengatakan, berdasarkan aspek keamanan, penggunaan vaksin Sinopharm sebagai booster umumnya dapat ditoleransi dengan baik.

(Ati)-d

## MASIH TERGANTUNG AKTIVITAS USAHA

# Pemulihan Ekonomi Semakin Merata

**JAKARTA (KR)** - Pemulihan ekonomi telah terjadi di semua sektor dan semakin merata, meskipun kecepatan pemulihannya masih sangat bergantung pada jenis aktivitas usaha dan dampak pandemi pada sektor terkait. Kebijakan untuk sektor tertentu seperti properti dan otomotif juga memberikan dampak positif.

"Masih tergantung aktivitas usaha dan dampak pandemi terhadap sektor-sektor tersebut," kata Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (2/2).

Misalnya insentif PPN untuk perumahan dari Pemerintah, diperkuat kebijakan Bank Indonesia yang melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu, serta pelonggaran aset tertimbang menurut risiko (ATMR), ketentuan tarif pre-

mi asuransi, dan uang muka perusahaan pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mampu mendorong realisasi kredit properti hingga Rp 465,55 triliun (Desember 2021).

"Untuk sektor otomotif, insentif PPNBM kendaraan bermotor dari Kemenkeu, yang dikolaborasi dengan pelonggaran ATMR dan uang muka perusahaan pembiayaan oleh OJK serta pelonggaran uang muka kredit oleh BI, turut mendorong realisasi kredit kendaraan bermotor hingga Rp 97,45 triliun (Desember 2021). Capaian ini sejalan dengan peningkatan penjualan mobil di 2021 ke level 863,3 ribu pada 2021," beber Sri Mulyani.

Sementara dukungan KSSK terhadap sektor perbankan menjadi bagian dari paket kebijakan dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi melalui intermediasi perbankan. "Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai

kewenangan masing-masing mengimplementasikan kebijakan untuk memberikan keyakinan perbankan dalam menyalurkan kredit/pembiayaan, mendukung likuiditas industri perbankan, menjaga kinerja perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan," tegasnya.

Pemerintah mengimplementasikan program penjaminan kredit dalam rangka memberikan keyakinan kepada perbankan untuk meningkatkan partisipasinya di dalam menjaga dan mendorong kinerja dunia usaha melalui penyaluran kredit. Program penjaminan kredit tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2020 dan dilakukan kalibrasi kriteria pada 2021, terutama untuk penjaminan kredit korporasi. Kalibrasi tersebut mencakup pelonggaran kriteria pelaku usaha korporasi sehingga lebih akomodatif dan fleksibel untuk mencakup lebih banyak korporasi penerima fasilitas penjaminan.

(Lmg)-f

## HARI INI DILANTIK KASAU

# Marsda TNI Eko, Gubernur AAU

**SLEMEN (KR)** - Marsda TNI Eko Dono Indarto SIP MTr(Han) menjabat sebagai Gubernur Akademik Angkatan Udara (AAU) menggantikan Marsda TNI Nanang Santoso. Pelantikan Marsda TNI Eko Dono Indarto dilaksanakan, Kamis (3/2) hari ini oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fajar Prasetyo SE MPP di lapangan Dirgantara Kesatrian AAU.

Kepala Penerangan AAU Mayor Sus Agus Salim, Rabu (2/2) mengatakan, Marsda TNI Eko Dono Indarto SIP merupakan alumni AAU tahun 1989. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Komandan Kodiklat TNI di Jakarta. Sedangkan pejabat lama, Marsda TNI Nanang Santoso merupakan Alumni AAU tahun 1987 dan selanjutnya menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI di Jakarta.

Menurut rencana, selain Kasau, acara tersebut juga dihadiri para asisten Kasau,



KR-Istimewa

**Marsda TNI Eko Dono Indarto**

para pejabat utama TNI AU, Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny Inong Fajar Prasetyo, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan para pejabat Forkompimda DIY.

Selain pernah menjabat Wadan Kodiklat TNI, pria kelahiran 23 Mei 1968 ini, juga pernah berdinast sebagai Dirid Kodiklat TNI, Sedsisopslatu, Pamen Sopsau Dik PPRALemhanas dan Asops Kas Koopsau II. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai Danlanud Eli, Danwing 2 Lanud ABD, Kadisops Lanud ABD dan lainnya.

"Marsda TNI Eko Dono Indarto sudah malang melintang di dunia TNI AU. Selanjutnya akan memimpin AAU untuk membentuk para taruna menjadi perwira TNI AU yang berkarakter, berintegritas, profesional dan berawasan kebangsaan, serta menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pendidikan di AAU," katanya.

(Sni)-f

## BISA DIATUR DI REVISI UU NARKOTIKA Bandar Narkoba Harus Dimiskinkan

**JAKARTA (KR)** - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan bandar narkoba harus dimiskinkan. Ia berharap aturan pemiskinan bandar narkoba dapat diatur secara tegas dalam revisi Undang-Undang (UU) No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. "Pemakainya harus dihilangkan dalam arti direhabilitasi, sementara bandarnya dimiskinkan melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). Barangkali usulnya di UU Narkotika itu," kata Menteri Yasonna H Laoly saat rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (2/2).

Guru Besar Ilmu Kriminologi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu mengatakan rencana revisi UU Narkotika sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat pada bulan November 2021. Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kemenkumham juga membahas kinerja dan capaian kementerian itu pada tahun 2021, termasuk rencana kerja pada tahun 2022.

Salah satunya, Kemenkumham telah melakukan layanan rehabilitasi narkotika melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial narapidana pengguna narkotika dengan target 21.540 narapidana pada 99 unit pelaksana teknis pemasyarakatan.

Tidak hanya itu, Kemenkumham juga melakukan pengembangan fitur rehabilitasi narkotika pada sistem database pemasyarakatan serta meningkatkan validitas data informasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

(Sim)-f

## TERSERET PERKARA PENCUCIAN UANG Siwi Widi Kembalikan Rp 647,8 Juta ke KPK

**JAKARTA (KR)** - Mantan pramugari Siwi Widi Purwanti telah mengembalikan uang Rp 647.850.000 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara pencucian uang terdakwa mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Wawan Ridwan. KPK, mengapresiasi sikap kooperatif tersebut dan mengharapkan Siwi Widi dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan.

"Dari informasi yang kami terima, saksi Siwi Widi saat ini telah mengembalikan seluruh uang yang diduga dinikmatinya sebagaimana uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan perkara yang sedang tahap pemeriksaan di persidangan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/2).

Namun, untuk menjadi lebih jelas dan terangnya perbuatan terdakwa (Wawan Ridwan), menurut Fikri tentu diharapkan saksi kooperatif hadir ketika keterangannya dibutuhkan di hadapan Majelis Hakim.

Sebelumnya, dua mantan pemeriksa pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP Wawan Ridwan dan



KR-Instagram

**Siwi Widi**

Alfred Simanjuntak didakwa menerima suap dan gratifikasi secara bersama-sama dan selanjutnya Wawan serta anaknya bernama Muhammad Farsha Kautsar didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dalam dakwaan keempat, Wawan bersama sang anak Muhammad Farsha Kautsar pada April 2018-Agustus 2020 didakwa melakukan pencucian uang.

(FuI)-d

## KPK Tahan Mantan Dirjen Kemendagri

**JAKARTA (KR)** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/2) menahan tersangka mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noerianto (MAN).

KPK pada Kamis (27/1) telah mengumumkan Ardian sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021. "Untuk kepentingan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan tersangka untuk 20 hari pertama dimulai 2 Februari 2022 sampai 21 Februari 2022," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta.

Selain Ardian, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur (AMN) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara Laode M Syukur Akbar (LMSA).

Dalam konstruksi perkara, Alex menjelaskan, Ardian memiliki tugas di antaranya melaksanakan salah satu bentuk investasi langsung Pemerintah, yaitu pinjaman PEN tahun 2021 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berupa pinjaman program dan/atau kegiatan sesuai kebutuhan daerah.

Pada Maret 2021, Andi Merya menghubungi Laode M Syukur agar bisa dibantu mendapatkan pinjaman dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur. Selain menghubungi Laode M Syukur, ada pula permintaan bantuan lain oleh Andi Merya pada LM Rusdianto Emba yang juga telah mengenal baik Ardian.

(Ant)-d